

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Partisipasi semua segmen masyarakat sebagai aktor pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam pembangunan. Pemerintah dan masyarakat harus harmonis, saling melengkapi dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembangunan harus dilakukan dari tingkat pusat ke tingkat desa. Nurcholis (2013) Pembangunan pedesaan adalah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, materi dan spiritual, berdasarkan prinsip Pancasila, di dalam sebuah desa. (Pilaili et al., 2022).

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan desa bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perdamaian serta kesejahteraan. Ini adalah tanggung jawab nasional yang diemban oleh pemerintah, mencakup kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan keselamatan mereka. Desa yang berkembang didefinisikan oleh penerapan hukum yang adil dan merata. Tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita, anak-anak dan orang dewasa, serta berdasarkan agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan sebagainya. Tanpa memenuhi kebutuhan dasar manusia, pembangunan tidak akan berhasil. Tingkat investasi dalam proyek-proyek pekerjaan publik akan berdampak signifikan pada keberhasilan penyelesaian proyek konstruksi di desa tersebut. Secara umum diterima bahwa dalam jangka waktu tertentu, prediksi pembangunan akan memberikan panduan yang jelas untuk harapan masyarakat desa (Arisandi, 2014).

Untuk membiayai kegiatan pemerintah, program pengembangan desa, dan pembangunan infrastruktur, dan layanan publik, pemerintah desa biasanya menerima dana dari Pendapatan dan Biaya Desa (APBDes). Dana ini berasal dari dana desa, transfer dari pemerintah pusat, dan pendapatan desa setempat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,

pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO) dan sektor bisnis Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Desa, pemerintah Desa juga memastikan bahwa masyarakat desa tetap terlibat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti deliberasi desa atau forum partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemerintah desa dapat memainkan peran dalam pembangunan berkelanjutan dan kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan mengelola sumber daya yang ada secara efektif, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan potensi desa (Nusanto, 2017). Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan adat istiadat lokal dan budaya. Mereka dapat mendukung kegiatan artistik, budaya, dan tradisional, seperti festival, pertunjukan seni, dan acara tradisional. Mereka juga dapat membantu melestarikan lingkungan pedesaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem desa.

Selain itu, pemerintah desa di Indonesia dapat berfungsi sebagai mediator antara masyarakat desa dan pemerintah daerah dan pusat. Mereka dapat menyuarakan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa kepada pejabat pemerintah yang lebih kuat, dan mereka dapat mengatur program pembangunan yang menguntungkan pemerintah daerah atau pusat. (Mulyono et al., 2021) Pemerintah desa juga dapat mewakili komunitas desa di forum kebijakan tingkat atas. Selain itu, melalui forum partisipatif atau deliberasi desa, masyarakat pedesaan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan oleh administrasi desa.

Irmansyah(2021) Untuk meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk desa, pembangunan infrastruktur sangat penting. Desa-desa saat ini menderita infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang rusak, fasilitas sanitasi yang tidak dipelihara, listrik yang tidak stabil, dan akses internet yang tidak dapat

diandalkan. Karena standar konstruksi yang berbeda antara kota dan desa, beberapa daerah menjadi tidak stabil dan mengalami masalah ekonomi dan sosial. Tujuan pembangunan infrastruktur desa adalah untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan aksesibilitas dan potensi ekonomi desa, serta meningkatkan kualitas hidup bagi penduduknya. Setiap desa memiliki kemampuan untuk membangun koneksi antara layanan publik, pasar, dan peluang ekonomi yang lebih erat terkait dengan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, infrastruktur yang baru dibangun juga dapat membantu mengurangi hambatan yang mencegah penduduk desa bepergian ke kota (Fitryani et al., 2021).

Melalui fungsi legislatif yang aktif dan efisien, desa-desa dapat mendistribusikan dana yang tepat, mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi legislatif menggunakan uang partai politik untuk pengembangan desa menunjukkan sejauh mana legislatif bisa ditemukan dalam persiapan pemilihan umum pada tahun 2024. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang, dalam Pasal 12 A, mengajukan kandidat untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang, telah mencakup penggunaan anggaran yang diperoleh dari partai politik ini. Ini menunjukkan afiliasi legislator dengan partai-partai politik, dan pada titik b: mempublikasikan agenda partai politik.

Tujuan unik dari sebuah partai politik adalah untuk memajukan prinsip-prinsip anggota-anggotanya di bidang masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik di Indonesia terutama diselenggarakan dengan tujuan berpartisipasi dalam sesi parlemen nasional, seperti yang ditentukan dalam Pembukaan Hukum Dasar Negara, sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia No. 31 tahun 2002. Pentingnya partai politik dalam sistem politik suatu negara sangat penting. Mereka bersaing untuk pengaruh politik dalam pemilihan umum dan berfungsi sebagai sambungan antara pemerintah dan masyarakat. Distribusi

sumber daya negara, seperti dana publik yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik partai politik. Keputusan dan alokasi anggaran negara, termasuk dana yang dikeluarkan untuk pengembangan infrastruktur, berada di bawah pengawasan partai politik yang berkuasa. Salah satu komponen yang paling penting dalam pembangunan suatu negara adalah pembangunan infrastruktur (Lumban Tobing & Brodjonegoro, 2013).

Setyaningsih (2019) Partai politik sering mengalami kesulitan dalam mengamankan dana yang memadai untuk upaya politik mereka, seperti pemilihan umum dan kampanye politik, karena ketergantungan mereka pada dana partai politik. Partai politik mungkin rentan terhadap pengaruh donor atau kelompok kepentingan tertentu karena ketergantungan mereka pada dana partai. Hal ini berpotensi mempengaruhi keputusan partai politik untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan desa. Kualitas proyek konstruksi yang dibangun juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pembangunan desa, yang merupakan pengaruh dana partai politik pada pembangunan desa.

Jika partai politik lebih fokus pada kepentingan politik dan keuntungan pribadi, maka mereka mungkin cenderung mengabaikan kualitas dan keberlanjutan proyek infrastruktur. Hal ini dapat berdampak negatif pada keandalan dan fungsi pembangunan yang dibangun. Pengaruh Politik Lokal dimana pengaruh dana partai politik terhadap pembangunan desa juga dapat bervariasi di tingkat lokal. Di beberapa wilayah, partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dapat menggunakan dana partai untuk memprioritaskan proyek pembangunan yang mendukung basis pemilih mereka, sementara mengabaikan kebutuhan pembangunan yang lebih luas. Hal ini dapat menyebabkan disparitas pembangunan desa antara daerah yang berbeda.

Pada tingkat lokal, partai politik sering kali memiliki program dan janji-janji dalam hal pembangunan infrastruktur, termasuk di desa-desa. Anggaran yang mereka dapatkan melalui sumbangan dari anggota partai atau sponsor dapat digunakan untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, saluran air, jembatan, sekolah, atau fasilitas kesehatan di desa. Pada tingkat

lokal, partai politik sering kali memiliki program dan janji-janji dalam hal pembangunan infrastruktur, termasuk di desa-desa. Anggaran yang mereka dapatkan melalui sumbangan dari anggota partai atau sponsor dapat digunakan untuk mendukung proyek pembangunan desa yang sangat dibutuhkan di masyarakat, seperti pembangunan jalan, peningkatan sistem saluran air, pembangunan jembatan, perbaikan sekolah, atau pembangunan fasilitas kesehatan di desa-desa yang terpencil. Anggaran anggaran partai ini memberikan partai politik kesempatan dan sumber daya untuk mendukung pembangunan desa di wilayah yang mereka pengaruhi (Widayanti et al., 2019).

Oleh sebab itu legislatif memiliki peran penting ini yang akan berguna bagi pembangunan desa. Sebagai perwakilan rakyat, lembaga legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang mendukung pembangunan desa. peran legislatif dapat mencakup beberapa hal yakni mengadvokasi kepentingan masyarakat desa dan menjadi wadah bagi aspirasi mereka.

Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan, legislatif dapat memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian Legislatif dapat berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembangunan. Mereka dapat mengadakan pertemuan, diskusi, dan konsultasi dengan masyarakat desa untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Kemudian, legislatif dapat mengadvokasi kepentingan masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan dan alokasi anggaran pembangunan desa (Nurochman, 2021).

Dengan melaksanakan peran-peran ini, legislatif dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Kolaborasi antara legislatif, pemerintah desa, dan masyarakat desa menjadi kunci penting untuk mencapai pembangunan desa yang lebih baik. Oleh karena itu peneliti akan meneliti peranan legislatif dalam Pembangunan infrastruktur desa di daerah Kabupaten Jember yang bertempat di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah pengaruh peran legislatif memiliki dampak terhadap pembangunan infrastruktur Desa studi di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk Menguji hubungan antara peran legislatif dengan pembangunan desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang pentingnya peran legislatif dalam pembangunan infrastruktur desa. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan peran legislatif dalam pembangunan infrastruktur desa, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

### **1.4.2 Manfaat Secara Teoristis**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peran legislatif dalam pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh legislatif dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa, serta peran-peran yang dimainkan oleh legislatif dalam pembangunan infrastruktur desa.